



**TANGGAPAN, MASUKAN, DAN PERTANYAAN**  
**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPR RI**  
**DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI DENGAN**  
**PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI**  
**(SEKJEN KKP, DIRJEN PSDKP, DIRJEN PDSP KP, DIRJEN PT, DIRJEN**  
**PB, DAN BKIPM KKP RI)**  
**KAMIS, 1 APRIL 2021**

-----

**Pembahasan : 1. Tata Kelola Kelembagaan, Pembinaan, dan Pengendalian Mutu Serta Kertelusuran;**  
**2. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing**  
**3. Aktifitas Ekspor-Impor Produk Kelautan dan Perikanan**

**Disampaikan oleh : DR. Ir. Hj. ENDANG S. THOHARI, DESS., M.Sc.**

**No. Anggota : A-84**

*Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*

*Salam sejahtera untuk kita semua,*

*Shalom*

*Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan,*

*Salam Indonesia Raya*

Yang Terhormat,

- 1. Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI;**
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI; dan**
- 3. Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI beserta jajaran;**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di tempat ini dan dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik. Amin ya rabbal alamin.

Permasalahan umum dan isu strategis yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan berkelanjutan di Indonesia adalah: 1) Pengelolaan Perikanan (*fisheries management*); 2) Penegakan Hukum (*law enforcement*); dan 3)

Pelaku Usaha Perikanan. Masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan merupakan isu strategis dan permasalahan umum yang pokok dalam mewujudkan sektor perikanan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini telah diindikasikan dengan tidak meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Indonesia.

Selain itu juga kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan di Indonesia relatif masih lemah, baik secara kuantitas dan kualitas. Belum kuatnya penegakan hukum di bidang perikanan ini, selain mengakibatkan kerugian negara, secara ekonomi dan lingkungan, juga berdampak pada penegakan kedaulatan wilayah negara, maraknya kegiatan *illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang jelas-jelas menjadi kendala utama untuk mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan.

Isu strategis lainnya adalah pelaku usaha perikanan yang sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang usaha perikanan yang berkelanjutan dan juga belum memiliki skala usaha yang layak (*economy of scale*). Akibatnya, tidak sedikit pelaku usaha perikanan yang melakukan praktik-praktik usaha perikanan yang tidak berkelanjutan yang mana pelaku usaha perikanan lebih cenderung mengejar kuantitas produksi semata, tanpa memperhatikan kualitas dan daya dukung ekosistemnya.

Sehubungan dengan pembahasan terkait;

1. Tata kelola kelembagaan, pembinaan, dan pengendalian mutu serta kertelusuran;
2. Monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan *IUU Fishing*;
3. Aktifitas ekspor-impor produk kelautan dan perikanan;

Fraaksi Partai Gerindra DPR RI menyampaikan beberapa catatan, masukan dan pertanyaan sebagai berikut;

1. Terjadinya penolakan terhadap produk ekspor perikanan Indonesia, contoh kasus, ditolakny produk ekspor perikanan kita senilai Rp 8,4 triliun ke Amerika Serikat membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan integrasi Sistem Telusur Dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) dimana Stelina ini merupakan dashboard informasi yang memuat neraca ikan, ketertelusuran dan keamanan pangan. STELINA juga diklaim menjadi instrumen pemantauan impor perikanan sekaligus memuat informasi syarat ekspor ke negara-negara

tujuan ekspor produk perikanan Indonesia. Pertanyaan kami adalah jika kedepannya terjadi penolakan produk ekspor perikanan kita di negara tujuan, apakah ada solusi melalui STELINA ini?

2. Sepanjang 2020, ekspor produk kelautan dan perikanan telah menjangkau 157 negara dan telah menerbitkan 614.838 sertifikat ekspor, impor dan domestik sebagai jaminan keamanan produk komoditas kelautan dan perikanan. Pertanyaan kami adalah apa upaya dan terobosan Sekjen KKP pada tahun 2021 ini untuk mendorong peningkatan value ekspor dan domestik produk perikanan nasional ke negara tujuan ekspor?
3. Penegakan hukum dan peningkatan keamanan di laut Indonesia dengan panjang garis pantai 104 ribu kilometer, dan teritorial laut 2.981.211 km<sup>2</sup> serta wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) mencapai 200 mil laut dari garis pantai memerlukan perhatian yang besar karena besarnya potensi sumberdaya laut yang ada didalamnya. Kegiatan ilegal Fishing di WPP-RI telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia, kami meminta penjelasan terkait total kerugian ekonomi akibat illegal fishing di Indonesia? Beserta PP dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam memberantas ilegal fishing tersebut.
4. Selama ini sering terjadi tumpang tindih antara kerja Satgas 115 dengan instansi yang mencegah pencurian ikan antara lain; TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud). Dengan SOP yang baru, komado dipegang langsung Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam proses pengawasan laut, bagaimana bentuk kordinasi dan pembagian tugas dengan lembaga lainnya, dan sejauh mana efektifitas kerja Forum Koordinasi Tindak Pidana Perikanan dalam menangani tindak pidana perikanan? Kami minta penjelasan PSDKP berkaitan hal tersebut dan wewenang PSDKP setelah diberlakukannya UU Ciptakerja dan Peraturan Pemerintah terkait.
5. Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa selain menenggelamkan kapal asing pencuri ikan di wilayah laut Indonesia untuk efek jera, kami juga mendukung agar kapal hasil sitaan dapat dimanfaatkan untuk perguruan tinggi dan nelayan yang membutuhkan. Kami meminta penjelasan terkait mekanisme perguruan tinggi dan nelayan untuk bisa mengakses kapal sitaan tersebut? Lalu bagaimana

strategi KKP menimbulkan efek jera pada para pencuri ikan/pelaku illegal fishing di wilayah laut Indonesia?

6. Terkait penerbitan Surat Keterangan Ketelusuran (SKK) Pengangkutan Koral dan Karang Hias setelah dibukanya kembali kran ekspor perdagangan koral dan karang hias. Fraksi Partai Gerindra menanyakan kepada PSDKP perkembangan kegiatan ekspor koral dan karang hias setelah terbitnya SKK terkait dibukanya kembali perdagangan koral dan karang hias tersebut? Dan bagaimana kerjasama antara KKP dan KLHK terkait ekspor koral dan karang hias ini?
7. Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal PDSPKP seharusnya memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam pelayanan persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat. Fraksi Partai Gerindra mengingatkan PDSPKP agar sistem pelayanan yang dibuat mempermudah masyarakat terutama UMKM produk perikanan dalam pengurusan persyaratan dokumen usaha perikanan untuk mendapatkan SNI, karena banyak UMKM di daerah yang produknya bagus tapi belum mendapatkan SNI, kami meminta penjelasan apa kendalanya dan permasalahannya, apakah hal tersebut ada kaitannya dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN)?
8. Penyerapan hasil produk perikanan yang berasal dari nelayan dan pembudidaya ikan selalu menjadi persoalan yang tak pernah terselesaikan sejak lama. Artinya produksi berjalan lancar namun penyerapan produksi selalu tersendat. Fraksi Partai Gerindra menanyakan sejauh mana optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang diperuntukkan sebagai sistem yang tepat dalam membantu nelayan dan pembudidaya ikan dalam memasarkan hasil produksi mereka? Mengingat, dengan skema SRG mereka semua dinilai akan mendapatkan harga tawar yang lebih baik dan sekaligus jaminan penyerapan pasar untuk seluruh produk perikanan mereka hingga ke pasar ekspor.
9. Sistem karantina, pengendalian mutu, dan keamanan sektor kelautan dan perikanan kita perlu ditingkatkan sehingga produk perikanan kita mampu bersaing dengan produk perikanan negara lain. Untuk itu Fraksi Partai Gerindra menekankan kepada BKIPM sebagai ujung tombak pengendalian mutu produk hasil perikanan terus bekerja keras guna menjamin kelancaran ekspor produk

kelautan dan perikanan Indonesia. Mengingat, ada beberapa kasus produk perikanan kita ditolak masuk ke negara tujuan ekspor. Pertanyaan kami, upaya apa yang dilakukan BKIPM terhadap produk perikanan kita yang ditolak masuk ke negara tujuan ekspor?

10. Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa dalam rangka pemantapan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (SJM KHP) perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Karena kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*Quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar regional dan internasional. Kami mendorong agar BKIPM memiliki SDM handal dan terlatih serta dukungan peralatan yang memadai apabila produk perikanan kita tidak ingin ditolak oleh negara tujuan ekspor.
11. Komoditas ekspor unggulan produk perikanan Indonesia saat ini adalah udang, data menunjukkan ekspor udang Indonesia sebesar 239.000 ton setara dengan transaksi USD 2,04 miliar. Fraksi Partai Gerindra meminta BKIPM harus serius menjaga dan mempertahankan agar kualitas mutu produk ekspor udang kita tetap terjaga, mengingat begitu besar pemasukan devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor udang tersebut. Kami menanyakan strategi dan langkah apa saja yang akan, dan yang telah dilakukan BKIPM dalam menjaga standar mutu dan keamanan udang ekspor kita?

**Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI;**

**Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI; dan**

**Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI beserta jajaran;**

Demikian tanggapan, masukan, dan pertanyaan Fraksi Partai Gerindra ini kami sampaikan dengan harapan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan mampu meningkatkan kuantitas, kualitas, standar mutu, dan keamanan serta daya saing produk perikanan nasional dalam meningkatkan income devisa negara melalui ekspor impor produk perikanan Indonesia yang berdaya saing tinggi dengan keamanan produk yang mumpuni di pasar global. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
*Salam Indonesia Raya.*

**KOMISI IV FRAKSI PARTAI GERINDRA DPR RI**

G. Budisatrio Djiwandono	- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
Ir. KRTH. Darori Wonodipuro, M.M., IPU	- Kapoksi
Ir. Endro Hermono, M.B.A.	- Anggota
DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc.	- Anggota
DR. H. Azikin Solthan, M.Si.	- Anggota
Ir. H. TA Khalid, M.M.	- Anggota
Renny Astuti, S.H., S.pN.	- Anggota